



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LANGGENG NURDIANSAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 122244

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.428.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 235 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 728.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 829.400.000

1. LAINNYA, UNITED MTB UNITED Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
400.000
2. MOBIL, HONDA JEEP S.C. HDTP Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 390.000.000
3. LAINNYA, ELEMENT PIKES GEN2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
4. MOBIL, MAZDA 35HBRHHDCE20006EBCRAW Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.669.235

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.290.069.235

III. HUTANG Rp. 819.762.300



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.470.306.935

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.